

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asshiddiqie, Jimly. *Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat*. Jakarta: Konstitusi Press, 2019.
- _____. *Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- _____. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Asy'ari, Hasyim. *Dinamika Hukum Pemilu: Produk Hukum KPU, Problematika dan Implementasi*. Jakarta: KPU RI, 2022.
- _____. *Panduan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS untuk KPPS*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum, 2014.
- Birch, Sarah. *Electoral Malpractice*. Oxford: Oxford University Press, 2011. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199606160.001.0001>
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Edisi Revisi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Dahl, Robert A. *Polyarchy: Participation and Opposition*. New Haven: Yale University Press, 1971.
- Fahmi, Khairul. *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Gaffar, Janedjri M. *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2013.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- _____. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.
- Indroharto. *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Buku I. Jakarta: Sinar Harapan, 1993.

Kelsen, Hans. *Pure Theory of Law*. Berkeley: University of California Press, 1967.

Linz, Juan J. dan Alfred Stepan. *Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe*. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1996.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cetakan ke-17. Jakarta: Kencana, 2022.

Merloe, Patrick. *Pemilihan Umum Demokratis: Hak Asasi, Kepercayaan Masyarakat, dan Persaingan yang Adil*. Jakarta: United States Information Agency, 1994.

Norris, Pippa. *Why Electoral Integrity Matters*. Cambridge: Cambridge University Press, 2014.
DOI: <https://doi.org/10.1017/CBO9781107280861>

Surbakti, Ramlan, Didik Supriyanto, dan Hasyim Asy'ari. *Menjaga Integritas Pemungutan dan Penghitungan Suara*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011.

_____. *Menjaga Kedaulatan Pilih*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011.

_____. *Merancang Sistem Politik Demokratis: Menuju Pemerintahan Presidensial yang Efektif*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011.

_____. *Penanganan Pelanggaran Pemilu*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011.

_____. *Penanganan Sengketa Pemilu*. Edisi Revisi. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.

Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu.

C. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Provinsi Jawa Timur Tahun 2008.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PHPU.C-VII/2009 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009, mengenai penetapan hasil perolehan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PHPU.D-XI/2013 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2013, mengenai penetapan hasil perolehan suara oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

D. Jurnal dan Artikel Ilmiah

Anggraini, Titi dan August Mellaz. Beberapa Catatan atas Keberlakuan UU No. 8 Tahun 2012. Jakarta: Perludem, 2013.

Anggraini, Titi. "PSU, Pembelian Suara, dan Diskualifikasi Calon." Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2025. <https://law.ui.ac.id/psu-pembelian-suara-dan-diskualifikasi-calon-oleh-titi-anggraini-s-h-m-h/>

Arifin, Muhammad Daniel. "Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Padang." *UNES Journal of Swara Justisia* 6, no. 3 (2022): 209–217. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v6i3.263>

Astuti, T., et al. "Representasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 dalam Prosedur Pemilu yang Bermutu dan Berintegritas." *JURNAL USM LAW REVIEW* 7, no. 2 (2024): 528–539. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.8551>

Budhiati, Ida. "Rekayasa Sosial Sistem Integritas Penyelenggara Pemilu." *Jurnal Hukum Sasana* 8, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.31599/sasana.v8i1.1249>

Fahmi, Khairul. "Pergeseran Pembatasan Hak Pilih dalam Regulasi Pemilu dan Pilkada." *Jurnal Konstitusi* 14, no. 4 (2017): 745. <https://doi.org/10.31078/jk1443>

_____. "Sistem Keadilan Pemilu dalam Penanganan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu Serentak 2019 di Sumatera Barat." *Jurnal Konstitusi* 17, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.31078/jk1711>

Fahmi, Khairul, Feri Amsari, Busya Azheri, dan Muhammad Ichsan Kabullah. "Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 2 (2015): 264–283. <https://doi.org/10.31078/jk1224>

Handayani, Retno Sari. "Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Indonesia." *Perspektif* 9, no. 1 (2020): 9–18. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v9i1.2828>

Hayckel, Edralin, Caroline Paskarina, dan Ratnia Solihah. "Peran Prinsip-Prinsip Fundamental Penyelenggaraan Pemilu dalam Meningkatkan Integritas Badan Pengawas Pemilihan Umum." *JANE: Jurnal Administrasi Negara*, 2024.

- Kurnia, Kamal Fahmi. "Keadilan Pemilu (Electoral Justice)." *Jurnal Litigasi* (2024). <https://doi.org/10.31078/jk18310>
- Kurniawan, Hamdan. "Pemungutan Suara Ulang: Menyoal Batas Waktu dan Faktor Penyebab." *Jurnal KPU*, 2019.
- Muhlisin, Muhlisin, Luqman Hakim, dan Rian Adhivira Prabowo. "Pertautan yang Legal dan yang Etis: Pemaknaan Regulasi KPU dan Bawaslu dalam Putusan DKPP." *Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 4, no. 1 (2022): 121–141. <https://doi.org/10.46874/tkp.v4i1.546>
- Pandia, Mutia Pebi, Nur Hidayat Sardini, dan Puji Astuti. "Pemungutan Suara Ulang Pemilu Tahun 2024 di Desa Tenggak Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen." *Journal of Politic and Government Studies*, Universitas Diponegoro, 2024.
- Raden, Sahran. "The Theory of Fairness With Integrity in Indonesia's Electoral Justice System." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 18, no. 2 (2024): 185–202. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v18no2.3432>
- Saefulloh, Sarief, Oekan S. Abdoellah, dan Mudiyati R. "Integritas Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung dalam Pelaksanaan Pemilihan Presiden Tahun 2019." *Jurnal Civic Hukum* 5, no. 1 (2020): 97–110. <https://doi.org/10.22219/jch.v5i1.10999>
- Saputra, Almahdi, Dian Bakti Setiawan, dan Anton Rosari. "Politik Hukum Pengaturan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sumatera Barat." *Jurnal Niara* 18, no. 1 (2025): 45–57. <https://doi.org/10.31849/niara.v18i1.25401>
- Satrio, Abdurrachman. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Memutus Perselisihan Hasil Pemilu sebagai Bentuk Judicialization of Politics." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 1 (2016): 117–133. <https://doi.org/10.31078/jk1217>
- Solihah, Ratnia, Arry Bainus, dan Iding Rosyidin. "Pentingnya Pengawasan Partisipatif dalam Mengawal Pemilihan Umum yang Berintegritas dan Demokratis." *Jurnal Wacana Politik* 3, no. 1 (2018): 14–28. <https://doi.org/10.24198/jwp.v3i1.16082>
- Suhariyanto, Didik, Ade Sathya Sanathana Ishwara, dan Sinta Dyah Kirana. "Enforcement of the Code of Ethics for 2024 Election Organizers in Indonesia: A Substantive Justice Perspective." *Jurnal*

IUS Kajian Hukum dan Keadilan 12, no. 2 (2024): 357–371. <https://doi.org/10.29303/ius.v12i2.1441>

Warjiyati, Sri. "Penataan Struktur dan Kewenangan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam Upaya Mewujudkan Pemilihan Umum yang Demokratis di Indonesia." *ARISTO* 8, no. 1 (2020): 1–15. <https://doi.org/10.24269/ars.v8i1.2403>

Yatazakka, Refala Roqi dan Ristina Yudhanti. "Peran Bawaslu dalam Penanganan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilu 2024 di Provinsi Jawa Tengah." *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2025. <https://doi.org/10.56393/nomos.v5i2.3216>

E. Sumber Daring, Berita, dan Laporan

ACE Electoral Knowledge Network. "Electoral Administration: Polling Day Procedures and Standards." Diakses 16 Februari 2026. <https://aceproject.org/ace-en/topics/ea>

ACE Project. "Electoral Integrity." ACE The Electoral Knowledge Network (2012). Diakses 15 Februari 2026. <https://aceproject.org/ace-en/topics/ei/default>

Ahsin Thohari, Ahmad. "Mengawal Integritas Pemilu 2024." Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, 2023. <https://hukum.upnvj.ac.id>
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Depok. "Tahukah Kamu? Asas LUBER dan JURDIL Muncul di Era yang Berbeda." Diakses 16 Februari 2026. <https://kotadepok.bawaslu.go.id/berita/tahukah-kamu-asas-luber-dan-jurdil-muncul-di-era-yang-berbeda-ayo-simak-sejarahny>

Bawaslu RI. "Bawaslu Temukan 19 Masalah dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara di Pemilu 2024." 15 Februari 2024. <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/bawaslu-temukan-19-masalah-dalam-pemungutan-dan-penghitungan-suara-di-pemilu-2024>

Hukumonline. "Pemungutan Suara Ulang: Solusi atau Sumber Polemik Baru?" <https://www.hukumonline.com/berita/a/pemungutan-suara-ulang--solusi-atau-sumber-polemik-baru-lt686566709c19b/>

KPU Papua Pegunungan. "Hierarki Peraturan Perundang-undangan dan Relevansinya bagi KPU." Diakses April 2026. <https://papuapegunungan.kpu.go.id/blog/read/2803>

KPU Papua Pegunungan. "Pemungutan Suara Ulang (PSU): Proses, Dasar Hukum, dan Contohnya." Diakses 19 April 2026. https://papuapegunungan.kpu.go.id/blog/read/1327_pemungutan-suara-ulang-psu-proses-dasar-hukum-dan-contohnya

Liputan6.com. "7 PPLN Kuala Lumpur Dinonaktifkan, Pemungutan Suara Ulang Diambil Alih KPU RI." 28 Februari 2024. <https://www.liputan6.com/pemilu/read/5538500>

Pandia, Mutia Pebi, Nur Hidayat Sardini, dan Puji Astuti. "Malapraktik Pemilihan Umum Tahun 2024 di Luar Negeri: Studi Kasus di Kuala Lumpur, Malaysia." *Journal of Politic and Government Studies*, Universitas Diponegoro, 2024. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/47224>

Puslit DPR RI. "Pemungutan Suara Ulang Pemilu Legislatif 2024 Pasca- Putusan MK." Isu Sepekan, III-PUSLIT-Juni-2024-836. https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---III-PUSLIT-Juni-2024-836.pdf

Puslit DPR RI, "Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024," *Info Singkat*, XVII-9-I-P3DI-Mei-2025-2063, hlm. 3. https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-XVII-9-I-P3DI-Mei-2025-2063.pdf

Republika Online. "KPU: Pemungutan Suara di Luar Negeri Lancar, Kecuali di Kuala Lumpur." 7 Februari 2024. <https://pemilukita.republika.co.id/berita/s8ih3a484/>

Tempo.co. "Bawaslu Ungkap Dugaan Pelanggaran Pemilu di Kuala Lumpur." 14 Februari 2024. <https://www.tempo.co/politik/bawaslu-ungkap-dugaan-pelanggaran-pemilu-di-kuala-lumpur-87203>

Tempo.co. "Pemilu 2024: Sejumlah Daerah Gelar Pemungutan Suara Ulang, Apa Saja Penyebabnya?" 16 Februari 2024. <https://www.tempo.co/pemilu/pemilu-2024-sejumlah-daerah-gelar-pemungutan-suara-ulang-apa-saja-penyebabnya--86181>

"Kecurangan Pemilihan Presiden di Indonesia pada Tahun 2024: Analisis Kasus dan Dampaknya terhadap Demokrasi." *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, Universitas Negeri Jakarta,

2025. <https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/jmb/article/view/53161>

"Legitimasi Demokrasi dalam Hukum Pemilihan Umum." *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik* 2, no. 1 (Januari 2024). <https://journal.stekom.ac.id/index.php/Jaksa/article/download/1487/967/3875>

"Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017." *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (Juli 2024): 314–323. <https://journal.appihi.or.id/index.php/Amandemen/article/download/395/595/2162>